



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN

Chafiyah Putri Aisyah<sup>1</sup> • Hapsari Wiji Utami<sup>2</sup>

**Abstract.** Penelitian Kebijakan makanan bergizi gratis merupakan salah satu inovasi kebijakan sosial yang mulai digalakkan di Indonesia sebagai respons terhadap tingginya angka kemiskinan dan masalah gizi yang masih membayangi sebagian besar masyarakat. Program ini hadir untuk memastikan akses pangan bergizi bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, dengan tujuan utama memperkuat ketahanan gizi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan program makan bergizi gratis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis data sekunder. Data yang dianalisis mencakup dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan, publikasi lembaga independen, survei opini publik, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif dalam meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin, meningkatkan akses gizi anak-anak, dan memperkuat upaya penanggulangan stunting, serta mendukung kualitas pendidikan melalui peningkatan konsentrasi belajar siswa. Namun, program juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan variasi menu, distribusi yang belum merata, kualitas makanan, potensi korupsi, hingga kasus keracunan massal yang menurunkan kepercayaan masyarakat, serta tata kelola yang memerlukan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola, pengawasan, dan keterlibatan aktor lokal. Studi ini menegaskan bahwa kebijakan makanan bergizi gratis tidak hanya berperan sebagai intervensi kesehatan, tetapi juga strategi sosial untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat miskin.

**Kata Kunci:** Makanan Bergizi Gratis; Kemiskinan; Kesejahteraan; Kebijakan Sosial.

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

---

### PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan pembangunan. Salah satu prasyarat yang penting adalah kondisi gizi terhadap anak-anak sekolah. Masalah kekurangan gizi jangka panjang seperti stunting dan anemia tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga berdampak pada kemampuan konsentrasi, daya tahan saat belajar, serta prestasi akademik seseorang. Permasalahan gizi buruk dan stunting masih menjadi isu penting yang harus ditangani oleh Indonesia. Menurut hasil Survei Status Gizi

Correspondence Author  
Hapsari Wiji Utami  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email : [hapsari.wiji@uinsa.ac.id](mailto:hapsari.wiji@uinsa.ac.id)



Indonesia (SSGI) tahun 2022, persoalan ini masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Situasi tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan anak-anak, namun juga berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia dalam jangka panjang. Anak yang mengalami stunting memiliki kemungkinan lebih besar mengalami hambatan dalam perkembangan kemampuan berpikir, pencapaian akademik, serta produktivitas kerja ketika mereka dewasa nanti.

(Rakhmalia Imeldawati, 2025). Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemberian intervensi gizi sejak masa kanak-kanak menjadi faktor krusial dalam upaya membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Saat ini, Indonesia sedang berupaya mempersiapkan diri dalam menyongsong era bonus demografi serta mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia termasuk ke dalam deretan negara dengan angka stunting yang cukup tinggi, khususnya pada kelompok balita dan anak-anak. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, tercatat sekitar 24% anak mengalami stunting pada tahun 2021. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan sekitar 3%, sehingga pada tahun 2024 prevalensinya menjadi sekitar 21%. Walaupun mengalami penurunan Indonesia tetap menjadi negara tertinggi di dunia yang menderita stunting terutama pada usia balita dan anak-anak (Setiyawati et al., n.d.). Menurut WHO minimal standar untuk target pada stunting yakni dibawah 20%.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan inisiatif bernama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada awal tahun 2025. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu komitmen politik yang diusung oleh pasangan calon pemimpin nomor urut 02 yang menjadi sorotan utama dalam setiap agenda pemilihan umum. Janji politik yang telah diumumkan oleh para pemimpin terpilih menjadi harapan bagi masyarakat agar dapat direalisasikan dalam wujud kebijakan publik. Kebijakan ini disusun dengan tujuan menyediakan asupan gizi harian yang seimbang guna menunjang tumbuh kembang anak, sekaligus mendorong peningkatan kehadiran serta fokus belajar mereka di lingkungan sekolah (Basit & Ramadani, 2025).

Secara global, program pemberian makanan bergizi gratis bukanlah hal baru. Negara-negara seperti Brasil, Jepang, dan Amerika Serikat telah melaksanakan program serupa dengan tujuan meningkatkan gizi anak sekaligus memperkuat kualitas pendidikan dan kesehatan. Program *National School Lunch* di Amerika Serikat terbukti meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan mengurangi ketimpangan gizi antar kelompok sosial. Di Brasil, program *Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan angka kelaparan dan malnutrisi. Sementara di Jepang, konsep *shokuiku* yang menekankan pada pendidikan gizi sejak usia dini dengan cara menyediakan makanan bergizi dan seimbang di lingkungan sekolah.

Program ini lahir dari Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 yang mengamanatkan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana utama, dengan target sasaran mencapai puluhan juta penerima manfaat di berbagai provinsi, dengan cakupan kelompok rentan seperti siswa sekolah dasar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui



program ini diharapkan mampu mengurangi risiko kerentanan gizi sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga miskin (Hakim & Yuliana, 2025). Namun, belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji bagaimana kebijakan makanan bergizi gratis diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi baru dalam kajian literatur mengenai kebijakan sosial di Indonesia.

Selain aspek sosial dan kesehatan, perlu juga diperhatikan sisi ekonomi dari program ini. Program tersebut memiliki potensi signifikan untuk menimbulkan efek ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung. Dari perspektif rumah tangga, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berperan dalam meringankan beban pengeluaran keluarga. Di Indonesia, program ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan gizi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Dengan demikian, kajian terhadap implementasi program MBG menjadi relevan, tidak hanya untuk menilai efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola (Herdiana, n.d.).

Kemiskinan dan masalah gizi masih menjadi isu sentral dalam pembangunan Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun angka kemiskinan menggambarkan tren penurunan selama sepuluh tahun terakhir, jutaan masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan keterbatasan akses pada pangan bergizi. Kondisi ini diperparah oleh prevalensi stunting yang masih relatif tinggi, yakni 21,6% pada tahun 2022 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Fakta tersebut menggambarkan bahwa masalah kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, namun juga berimplikasi terhadap mutu sumber daya manusia di masa mendatang.

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
September 2022	26,36	9,57
Maret 2023	25,90	9,36
Maret 2024	25,22	9,03
September 2024	24,06	8,57
Maret 2025	23,85	8,47

**Sumber: Badan Pusat Statistik**

Dari perspektif kesejahteraan sosial, program makanan bergizi gratis dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan publik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan menyediakan akses makanan sehat, pemerintah secara tidak langsung meringankan pengeluaran rumah tangga miskin, memperkuat kualitas gizi anak-anak, dan upaya ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek penurunan kemiskinan dan kesehatan yang baik.

Namun, implementasi kebijakan tentu tidak lepas dari berbagai macam tantangan. Kompleksitas birokrasi, keterbatasan logistik, serta perbedaan kondisi sosial di setiap daerah menjadi faktor yang mempengaruhi capaian program (Zulaika et al., 2025). Oleh karena itu,



penting dilakukan kajian kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan, apa saja tantangan yang muncul, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampaknya terhadap kesejahteraan.

Kajian tentang kebijakan makanan bergizi gratis di Indonesia masih relatif baru, mengingat program ini baru diluncurkan pada awal 2025. Sejumlah kajian awal lebih banyak menyoroti aspek tata kelola dan regulasi. Sementara itu, survei lebih menekankan pada persepsi masyarakat terkait kualitas makanan dan distribusi. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas seperti pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, namun belum menyoroti secara spesifik terkait kemiskinan. Padahal, kemiskinan juga menjadi dampak dari program makan bergizi gratis yang secara tidak langsung meringankan pengeluaran rumah tangga (Jangka et al., n.d.). Penelitian lain juga berfokus seperti pengelolaan APBN, kondisi keuangan negara, peningkatan mutu Pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi.

Namun, masih sedikit penelitian yang menempatkan program MBG sebagai kebijakan multidimensi yang menghubungkan isu gizi, kemiskinan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, terdapat *research gap* yakni berupa minimnya penelitian yang mengkaji tentang kebijakan program makan bergizi gratis berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin, sebab mutu sumber daya manusia menjadi penentu dalam meningkatkan proses pembangunan di negara berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus utama dari penelitian ini pada analisis implementasi kebijakan makanan bergizi gratis di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mengkaji dinamika pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi manfaat serta hambatan yang ada, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif berbasis data sekunder, yang mengandalkan dokumen kebijakan, laporan evaluasi, survei opini publik, serta literatur terkait sebagai sumber utama analisis.

## METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, fokus utama penelitian yakni memahami secara mendalam implementasi kebijakan makanan bergizi gratis (MBG) serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial sebagaimana adanya berdasarkan data empiris, narasi, serta konteks yang menyertainya.

Pendekatan ini digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data dengan bersumber dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menelusuri berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal akademik, artikel, serta dokumen terkait lainnya guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan program makan bergizi gratis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis interaktif yang mencakup tahapan reduksi data yakni memilah informasi relevan terkait implementasi kebijakan, hambatan, dan dampak. Kemudian, penyajian data seperti menyusun informasi



dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks guna lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan, penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menemukan pola, hubungan, serta makna dari data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah.

## PEMBAHASAN HASIL

Kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024. Program ini merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang ditujukan bagi siswa sekolah dasar serta madrasah ibtidaiyah, terutama dari keluarga miskin. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak usia sekolah sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung kesejahteraan masyarakat miskin dalam jangka panjang (Sophian, n.d.).

**Tabel 2. Komposisi Makan Bergizi Menurut Pedoman Gizi Seimbang Kemenkes RI**

Komposisi Makanan Bergizi	Persentase
Makanan Pokok	33%
Lauk Pauk	17%
Buah-Buahan	17%
Sayur-Sayuran	33%

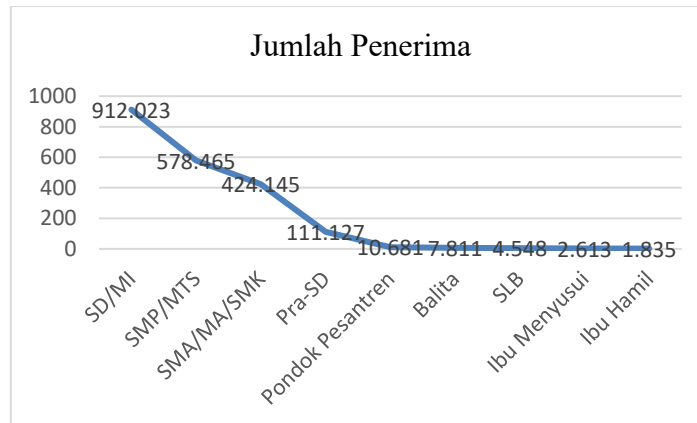
**Sumber: Kemenkes RI**

Berdasarkan data komposisi makan bergizi menurut pedoman gizi seimbang kemenkes RI dapat dilihat bahwa komposisi untuk makanan pokok sebesar 33%, lauk pauk sebesar 17%, buah-buahan sebesar 17%, sayur-sayuran sebesar 33%. Makanan pokok berfungsi sebagai sumber utama karbohidrat yang meliputi beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, serta berbagai produk olahannya seperti roti, mi, dan pasta. Sayuran menjadi sumber penting vitamin dan mineral, antara lain karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor, yang sebagian berperan sebagai antioksidan. Sementara itu, lauk-pauk menyediakan asupan protein, baik dari sumber hewani maupun nabati. Protein hewani dapat diperoleh melalui daging, ikan, telur, susu, serta produk turunannya, sedangkan protein nabati berasal dari tahu, tempe, dan aneka kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, maupun kacang tolo. Adapun buah-buahan kaya akan vitamin (A, B, B1, B6, dan C), mineral, serta serat, yang sebagian juga berfungsi sebagai antioksidan alami bagi tubuh.

Dalam tahap awal implementasi, program ini menysasar sekitar 82,9 juta peserta didik di seluruh Indonesia (Riset Jan Hoesada & Ksap, n.d.). Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan beragam pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, hingga penyedia jasa katering lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan mutu sumber daya manusia.



**Gambar 1. Jumlah Penerima Makan Bergizi Gratis (12 Maret 2024)**



**Sumber: Kementerian Keuangan RI**

Menurut data Kementerian Keuangan RI tertanggal 12 Maret 2024, penerima manfaat terbesar dari program ini berasal dari kalangan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan total mencapai 912.023 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa sasaran utama program ini adalah anak-anak usia sekolah dasar yang berada pada tahap pertumbuhan penting dan memerlukan asupan gizi yang memadai untuk mendukung perkembangan fisik maupun kemampuan kognitif mereka.

Selain itu, peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga menjadi bagian penting dari sasaran program, dengan jumlah penerima mencapai 578.465 siswa. Kelompok usia ini masih berada dalam masa perkembangan sehingga membutuhkan asupan gizi yang memadai untuk menunjang kemampuan belajar secara maksimal. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), program ini mencakup sebanyak 424.145 penerima. Tidak hanya terbatas pada anak usia sekolah, inisiatif ini juga menjangkau kelompok usia dini dengan menyediakan makanan bergizi bagi 111.127 anak pra-sekolah.

Selain itu, pondok pesantren juga termasuk dalam kelompok penerima manfaat dengan total 10.681 orang, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau peserta didik tidak hanya di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Program ini juga menargetkan kelompok masyarakat yang lebih rentan, antara lain balita sebanyak 7.811 penerima, anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 4.548 penerima, serta ibu menyusui dan ibu hamil masing-masing berjumlah 2.613 dan 1.835 penerima.

Sebelum kebijakan MBG digulirkan, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal kemiskinan dan status gizi masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36% atau sekitar 25,22 juta orang. Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan adanya tren penurunan





dibandingkan satu dekade sebelumnya, namun masih tergolong tinggi untuk negara dengan potensi ekonomi besar.

Masalah gizi juga masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, tingkat prevalensi stunting tercatat sebesar 21,6%, sementara kasus anak dengan berat badan kurang (*underweight*) mencapai 17% (Liza Munira & Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, n.d.). Data ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari lima anak di Indonesia masih mengalami hambatan pertumbuhan. Masalah gizi tersebut erat kaitannya dengan kondisi ekonomi keluarga miskin yang sulit menjangkau makanan bergizi secara konsisten.

Dengan adanya program MBG, pemerintah berusaha mengintervensi langsung masalah tersebut melalui penyediaan makanan gratis yang bergizi, bukan hanya sekadar bantuan pangan pokok. Pelaksanaan program MBG dilakukan dengan pendekatan berbasis sekolah. Sekolah berperan sebagai titik distribusi makanan bergizi yang dipasok oleh penyedia jasa katering atau dapur komunitas yang ditunjuk pemerintah daerah. Mekanisme ini memungkinkan program berjalan lebih efisien dan transparan karena sekolah memiliki data murid yang valid.

Namun, hasil observasi dan laporan media menunjukkan adanya tantangan implementasi, antara lain: pemerataan distribusi di wilayah terpencil serta ketersediaan bahan pangan sering terkendala transportasi, variasi menu terbatas seperti beberapa sekolah masih menyajikan makanan sederhana tanpa memperhatikan keragaman zat gizi, dan koordinasi antar lembaga juga diperlukan sinergi antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan pihak penyedia jasa katering agar kualitas program terjaga.

Pemerintah menetapkan bahwa sasaran utama dari program ini meliputi balita, peserta didik, serta ibu hamil dan menyusui yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat masih lebih sedikit dibandingkan target pemerintah pada tahun 2025, yakni sekitar 19,47 juta jiwa. Berdasarkan hasil analisis tim Kompas bersama BPS, terdapat sekitar 11,3 juta orang atau sekitar 12% dari total 93,8 juta penduduk yang tergolong memenuhi syarat sebagai penerima manfaat program MBG.

**Tabel 3. Kelompok Penerima Program Makan Bergizi Gratis (2024)**

Kelompok Penerima Program MBG	Persentase
Balita	33,5%
SD-SMA	48,4%
Ibu Menyusui	16,6%
Ibu Hamil	1,5%

**Sumber: BPS dan Litbang Kompas**

Dari total 11,3 juta penerima tersebut, sekitar 33,5% adalah anak balita yang berasal dari keluarga miskin. Sementara itu, 16,6% terdiri atas ibu menyusui dan 1,5% adalah ibu hamil. Adapun 48,4% sisanya merupakan siswa dari jenjang SD hingga SMA atau yang



setara, yang berasal dari keluarga miskin dengan tingkat asupan kalori masih di bawah standar kecukupan gizi.

Berdasarkan data hasil analisis Kompas, dari total 11,3 juta orang yang memenuhi kriteria, terdapat lima provinsi yang direkomendasikan sebagai wilayah dengan proporsi penerima program MBG tertinggi.

**Tabel 4. Rekomendasi Provinsi Prioritas Penerima Program MBG (2024)**

Provinsi	Persentase
Sulawesi Barat	26,7%
Gorontalo	25,9%
Sulawesi Tenggara	25,6%
Nusa Tenggara Timur	25,4%
Sulawesi Selatan	19,4%

**Sumber: Litbang Kompas**

Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebagai wilayah dengan proporsi tertinggi penduduk miskin yang layak menerima bantuan, yaitu sebanyak 150.377 jiwa atau sekitar 26,7%. Posisi berikutnya ditempati oleh Gorontalo dengan jumlah penerima 108.908 orang atau 25,9%. Di peringkat ketiga terdapat Sulawesi Tenggara dengan 288.888 orang atau 25,6% warga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima MBG, disusul oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 605.013 orang atau 25,4%, serta Sulawesi Selatan dengan 606.123 orang atau 19,4%. Provinsi-provinsi tersebut umumnya menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang lebih kompleks, seperti angka kemiskinan yang masih tinggi serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, sehingga membutuhkan dukungan lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakatnya (Lisa et al., 2025).

Kebijakan MBG tidak hanya berpengaruh terhadap aspek kesehatan anak, namun juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

1. Meningkatkan daya beli tidak langsung: keluarga miskin terbantu karena sebagian kebutuhan pangan anak dipenuhi oleh sekolah.
2. Menggerakkan ekonomi lokal: keterlibatan usaha katering kecil dan UMKM penyedia bahan makanan memperluas kesempatan kerja.
3. Mengurangi beban psikologis keluarga miskin: orang tua merasa lebih tenang karena anak-anak mereka mendapat jaminan makanan bergizi.

Hasil survei Populix (2024) menunjukkan bahwa 67% responden dari keluarga miskin merasa terbantu dengan adanya program MBG, terutama dari sisi pengeluaran harian. Sementara itu, 74% guru menyatakan adanya peningkatan konsentrasi belajar murid setelah mengikuti program. Penerimaan masyarakat terhadap program MBG cenderung positif, meskipun ada perdebatan di ranah publik mengenai efektivitas dan potensi politisasi kebijakan. Laporan Lembaga Survei Indonesia (2024) menemukan bahwa 70,2% responden mendukung program MBG, dengan alasan utama manfaatnya langsung dirasakan masyarakat





miskin. Namun, kritik juga muncul seperti, potensi ketidaktepatan sasaran akibat lemahnya data penerima manfaat, kekhawatiran keberlanjutan pendanaan jika tidak dikelola dengan baik, risiko makanan yang tidak higienis jika penyedia jasa tidak diawasi secara ketat.

Sejak tahap perencanaan, program ini telah menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Banyak pihak menilai inisiatif ini sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi masalah ketahanan pangan dan gizi buruk. Dengan demikian, terdapat pula pandangan kritis yang mempertanyakan efektivitas serta keberlanjutan pelaksanaannya. Perdebatan muncul seputar penggunaan anggaran, mekanisme distribusi makanan, hingga potensi terjadinya penyimpangan dalam implementasi program tersebut (Rahmah et al., n.d.).

**Tabel 5. Pandangan Masyarakat Mengenai Program Makan Bergizi Gratis (2024)**

Pandangan Masyarakat Program MBG	Persentase
Setuju	21%
Tidak Setuju	59%
Tidak Tahu	20%

***Sumber: Survei of Economic and Law Studies***

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) pada tahun 2024, sebanyak 59% responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program makan bergizi gratis. Persentase tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat tingkat keraguan yang tinggi di kalangan masyarakat mengenai efektivitas, keberlanjutan, serta tata kelola program tersebut. Sementara itu, hanya sekitar 21% responden yang menyatakan dukungan terhadap program ini, kemungkinan karena mereka menilai adanya manfaat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan dalam upaya penanggulangan masalah gizi. Adapun 20% responden lainnya memilih untuk tidak memberikan argumen atau mengaku tidak mengetahui secara jelas mengenai program tersebut, yang dapat mengindikasikan bahwa informasi terkait tujuan dan implementasi program belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Ketiga kelompok pandangan tersebut menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis masih menjadi topik yang menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Tingginya tingkat penolakan dan ketidaktahuan masyarakat menandakan pentingnya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan publik, sehingga tujuan serta manfaat program ini dapat lebih dipahami dan diterima secara menyeluruh oleh berbagai kalangan.



**Tabel 6. Hal yang Dikhawatirkan Masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis (2024)**

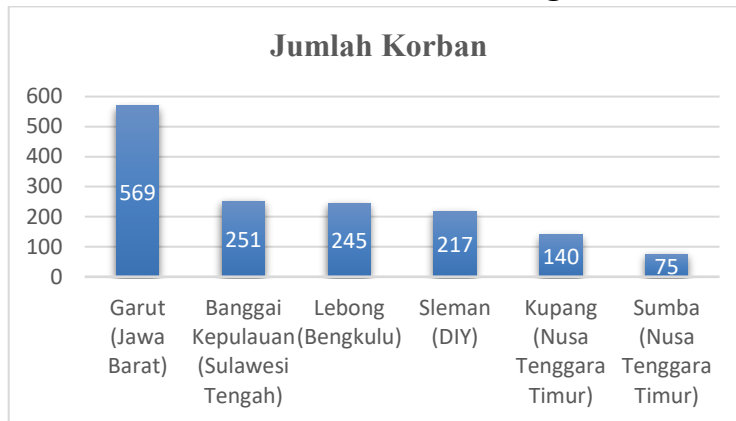
Hal Dikhawatirkan Masyarakat	Persentase
Penyaluran Tidak Efisien	46%
Korupsi	37%
Kualitas Makanan	14%
Biaya Implementasi	3%

***Sumber: Survei of Economic and Law Studies***

Salah satu kekhawatiran utama masyarakat terhadap program makan bergizi gratis berkaitan dengan potensi ketidakefisienan dalam proses penyalurannya, yang mencapai 46% dari total responden. Hal ini mencerminkan adanya keraguan publik terhadap sistem distribusi program, termasuk kemungkinan terjadinya kendala logistik maupun ketidaktepatan antara kebutuhan dan distribusi makanan di lapangan. Selain itu, sekitar 37% masyarakat menyoroti risiko terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat adanya sejumlah kasus penyalahgunaan anggaran pada program sosial di masa lalu. Oleh karena itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat agar dana program benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan.

Aspek kualitas makanan yang disalurkan juga menjadi sorotan, di mana sekitar 14% responden menilai hal tersebut sebagai isu penting. Walaupun tujuan utama program ini adalah menyediakan makanan bergizi, masih terdapat kekhawatiran bahwa mutu makanan yang diberikan tidak sepenuhnya memenuhi standar gizi maupun kebersihan yang diharapkan. Sementara itu, hanya sekitar 3% masyarakat yang menyoroti besarnya biaya pelaksanaan sebagai masalah utama. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat lebih menitikberatkan perhatian pada efektivitas dan kualitas pelaksanaan program daripada pada beban anggaran yang dikeluarkan pemerintah (Muh Fadhal High Pangera et al., 2025). Keempat bentuk kekhawatiran tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan menunjukkan perlunya perencanaan yang komprehensif serta pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan program. Apabila berbagai permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis akan meningkat secara signifikan. Diskursus publik ini menunjukkan bahwa meskipun program MBG menuai dukungan luas, aspek pengawasan dan transparansi harus diperkuat agar tujuan kebijakan tercapai.



**Gambar 2. Jumlah Korban Makan Bergizi Gratis**

**Sumber: BGN, JPPI**

Berdasarkan data terbaru Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per September 2025, lebih dari 5.360 anak di beberapa daerah di Indonesia dilaporkan mengalami keracunan akibat mengonsumsi menu MBG. Kasus ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu insiden besar terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana 314 siswa dari jenjang SD sampai SMA diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap menu makan bergizi yang disajikan pada Rabu, 17 September 2025.

Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menjadi pendukung utama program MBG dari peluncurannya pada 6 Januari 2025, sebelumnya telah menginstruksikan BGN untuk berjanji mencapai target nol kasus keracunan (Fiska Rahayu, 2025). Tetapi, sampai saat ini, masalah keracunan justru semakin meningkat dan menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Menurut JPPI, angka yang tercatat kemungkinan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata, sebab beberapa sekolah dan pemerintah daerah cenderung menahan laporan untuk menghindari perhatian publik.

Kegagalan dalam pengelolaan program MBG yang menyebabkan ribuan anak mengalami keracunan bukan sekadar kesalahan operasional, tetapi masalah sistemik yang memerlukan evaluasi menyeluruh (Sumantri Riyanto et al., n.d.). Dampak kesehatan pada ribuan anak ini mengancam tujuan utama program, yaitu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif terhadap seluruh proses, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi makanan, menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan anak-anak dapat terjamin.

Saat ini, meskipun pemerintah telah mengambil langkah cepat guna menangani kasus keracunan dan mencegah terulangnya masalah serupa, kepercayaan masyarakat pada program Makan Bergizi Gratis berada pada level yang rendah. Banyak orang tua enggan membiarkan anak mereka menerima makanan tersebut dikarenakan kekhawatiran akan risiko yang sama (Sumardi et al., 2025). Program MBG sebenarnya dirancang guna mengatasi masalah gizi buruk di kalangan pelajar, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Tetapi, tanpa pengelolaan dan pengawasan

yang efektif, program tersebut justru dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan anak-anak penerimanya.

Program MBG di Indonesia dapat dibandingkan dengan kebijakan serupa di negara lain:

1. Brazil: melalui *Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*, pemerintah menyediakan makanan gratis di sekolah dengan melibatkan petani lokal. Program ini terbukti menurunkan tingkat kelaparan anak hingga 12% dalam satu dekade.
2. Jepang: program *gakkou kyushoku* sudah berjalan sejak 1947 dengan fokus pada gizi seimbang dan pendidikan kebiasaan makan sehat.
3. Amerika Serikat: *National School Lunch Program* menyediakan makanan gratis atau bersubsidi untuk anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah sejak 1946.
4. WFP (World Food Programme) mencatat bahwa program pemberian makanan di sekolah mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah di negara berkembang hingga 9% terhadap anak laki-laki dan 15% terhadap anak perempuan (WFP, 2022).

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan program MBG di Indonesia sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan pelibatan aktor lokal dalam penyediaan makanan bergizi. Beberapa tantangan utama program MBG antara lain:

1. Kapasitas anggaran dan keberlanjutan meski tidak dibahas detail di artikel ini, tetap menjadi faktor penting untuk keberlangsungan program.
2. Pengawasan distribusi dan kualitas makanan agar makanan yang diterima anak benar-benar memenuhi standar gizi dan higienis.
3. Keterlibatan masyarakat seperti partisipasi orang tua, guru, dan komunitas lokal penting untuk menjaga akuntabilitas.
4. Integrasi dengan program lain seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) maupun program kesehatan ibu-anak.

Jika tantangan ini dapat diatasi, maka prospek program MBG ke depan sangat menjanjikan sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda.

## SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidakcukupan gizi pada anak usia sekolah. Hasil analisis menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempunyai peran penting dalam menekan angka stunting, meningkatkan mutu gizi anak, serta mendukung kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengurangan beban ekonomi keluarga. Selain itu, pelaksanaan program ini berkontribusi dampak positif dalam meningkatkan konsentrasi belajar dan mutu sumber daya manusia di masa depan. Namun, keberhasilan program masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi yang tidak merata, kualitas makanan, potensi penyalahgunaan anggaran, hingga kasus keracunan massal yang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi program MBG memerlukan tata kelola yang lebih baik, pengawasan ketat, transparansi, serta keterlibatan aktif masyarakat



dan pemerintah daerah. Dengan langkah tersebut, program MBG berpotensi menjadi instrumen kebijakan sosial yang efektif dalam mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek penurunan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Keberhasilan program makanan sekolah bergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas menu, dan keterlibatan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, program MBG dapat dikatakan berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin jika implementasinya dijalankan secara berkesinambungan dan disertai pengawasan yang ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>
- Fiska Rahayu, L. (2025). Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2). <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.381>
- Hakim, B. N., & Yuliana, W. (2025). Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. 24(2), 267–283.
- Herdiana, D. (n.d.). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063556>
- Jangka, D., Program, P., Gratis, M. B., Kesehatan, T., Pendidikan, K., Cenderawasih, U., Jayapura, U. T., Wulandari, L., & Sawir, M. (n.d.). THE LONG-TERM IMPACT OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM ON HEALTH AND EDUCATIONAL SUSTAINABILITY Rif'iy Qomarrullah 1 Suratni 2.
- Lisa, L., Merli, M., Puji, P., Nova, N., Rahma, R., Annisa, A., Gina, G., Reva, R., & Marniati, M. (2025). Edukasi Gizi Seimbang Untuk Meningkatkan Kesehatan Dan Konsentrasi Belajar Anak Sekolah Dasar. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 195–206. <https://doi.org/10.71153/zona.v2i2.162>
- Liza Munira, S., & Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, K. (n.d.). Disampaikan pada Sosialisasi Kebijakan Intervensi Stunting Jakarta, 3 Februari 2023 Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.
- Muh Fadhal Hiqh Pangera, A. T., Syahreza Nugrawan Ruzadi, A., & Ridwan Said Ahmad, M. (2025). Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran dan Dampaknya dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5).
- Rakhmalia Imeldawati. (2025). Dampak Terjadinya Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak : Literature Review. *Jurnal Medika Nusantara*, 3(1), 101–107. <https://doi.org/10.59680/medika.v3i1.1632>
- Riset Jan Hoesada, L., & Ksap, K. (n.d.). REALISASI JANJIAN KAMPANYE PILPRES: PROGRAM MBG DAN SUSU GRATIS.
- Setiyawati, M. E., Ardhiyanti, L. P., Hamid, E. N., Ayu, N., Muliarta, T., & Raihanah, Y. J. (n.d.). Studi Literatur: Keadaan Dan Penanganan Stunting Di Indonesia. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>
- Sophian, A. (n.d.). Meningkatkan Literasi Gizi Keluarga melalui Implementasi MBG. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16597.90081>
- Sumantri Riyanto, O., Rianita Elfrida Sinaga, M., & Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta, S. (n.d.). PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA.



- Sumardi, E., Iskandar, D., Nur Azizah, H., Studi Ilmu Komunikasi, P., Komunikasi dan Desain Kreatif, F., Budi Luhur Jakarta, U., & kunci, K. (2025). *Perbandingan Konstruksi Berita Makan Bergizi Gratis (MBG) di Media Online Indonesia*. 16(1). <https://doi.org/10.31506/JRK..V16i1.87026>
- Zakia, Emily. (2025, 20 September). Lebih dari 5 Ribu Anak Alami Keracunan Program Makan Gratis, Begini Data Terbaru!. *GoodStats*. Lebih dari 5 Ribu Anak Alami Keracunan Program Makan Gratis, Begini Data Terbaru! - GoodStats
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). *Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*. 01(03), 426–435.

